



Article Informations
Corresponding Email:
divazahraaqilah28@gmail.com

Received: 05/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA PADA TAHUN 2021-2023

Diva Zahra Aqilah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menangani perdagangan gelap narkoba di Indonesia pada tahun 2021-2023. Permasalahan tingginya angka perdagangan gelap narkoba pada periode tersebut menjadi fokus utama penelitian ini. Menggunakan teori peran organisasi internasional Clive Archer dan metode penelitian kualitatif analitis, penelitian ini menemukan bahwa UNODC berperan signifikan dalam beberapa aspek.

Sebagai instrumen, UNODC memainkan peran penting dalam mendukung Indonesia menangani perdagangan gelap narkoba melalui berbagai program dan inisiatif. UNODC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dalam program seperti Global SMART dan Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS), yang memperkuat kapasitas penegak hukum Indonesia dengan menyediakan pelatihan, dukungan teknis, dan peralatan canggih.

Sebagai arena, UNODC melaksanakan koordinasi internasional, memfasilitasi kerjasama dan diskusi antar negara untuk menghadapi tantangan perdagangan narkoba melalui forum seperti Consultative Dialogue, Early Warning System (EWS) Events, dan High-Level Meeting on Drug Policy (HONLAP). Forum ini memungkinkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk berbagi informasi dan strategi. Sebagai aktor independen, UNODC mempengaruhi kebijakan nasional melalui laporan tahunan, riset, dan program-program yang didesain sesuai agenda globalnya. UNODC membantu Indonesia merumuskan kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif dalam menangani masalah narkoba, menunjukkan kapasitasnya untuk bertindak mandiri dan mempengaruhi praktik dan kebijakan di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, UNODC berhasil menjalankan perannya sebagai instrumen kebijakan, arena koordinasi, dan aktor independen sesuai dengan teori Clive Archer, mendukung Indonesia dalam memerangi perdagangan gelap narkoba dengan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: UNODC, perdagangan gelap narkoba, Indonesia, Clive Archer, organisasi internasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in addressing illicit drug trafficking in Indonesia from 2021 to 2023. The high rate of illicit drug trafficking during this period is the main focus of this research. Using Clive Archer's theory of the role of international organizations and an analytical qualitative research method, this study finds that UNODC plays a significant role in several aspects.

As an instrument, UNODC plays an important role in supporting Indonesia in tackling illicit drug trafficking through various programs and initiatives. UNODC collaborates with the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian Maritime Security Agency (BAKAMLA) in programs such as the Global SMART and Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS), which strengthen the capacity of Indonesian law enforcement by providing training, technical support, and advanced equipment.

As an arena, UNODC implements international coordination, facilitating cooperation and discussion among countries to address the challenges of drug trafficking through forums such as Consultative Dialogue, Early Warning System (EWS) Events, and the High-Level Meeting on Drug Policy (HONLAP). These forums allow member states, including Indonesia, to share information and strategies.

As an independent actor, UNODC influences national policies through annual reports, research, and programs designed according to its global agenda. UNODC assists Indonesia in formulating more effective evidence-based policies to address drug issues, demonstrating its capacity to act independently and influence practices and policies at the national level.

Overall, UNODC has successfully carried out its roles as a policy instrument, coordination arena, and independent actor in accordance with Clive Archer's theory, supporting Indonesia in combating illicit drug trafficking more effectively and efficiently.

Keywords: UNODC, illicit drug trafficking, Indonesia, Clive Archer, international organization.

PENDAHULUAN

Indonesia menempati peringkat teratas sebagai negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi di kawasan ASEAN. Posisi ini menunjukkan bahwa perdagangan narkoba di Indonesia lebih signifikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Tingginya transaksi narkoba ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya memberantas peredaran, penyalahgunaan, dan perdagangan gelap narkoba. (PKIP UNAIR, 2021) Pada tahun 2021, Satuan Tugas Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap kasus besar yang melibatkan 1,1 ton sabu-sabu di beberapa tempat yaitu Bogor, Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sabu-sabu ini disuplai oleh jaringan narkoba internasional yang berasal dari wilayah Timur Tengah. (Penyelundupan 1,129 Ton Sabu Diungkap, Ini Beberapa Kasus Narkoba Terbesar Di Indonesia: Okezone

Nasional, 2021) Pada tahun 2022, sebanyak 1,196 ton atau senilai Rp1,43 triliun terungkap telah diselundupkan ke Indonesia dan diketahui sabu tersebut dikirim dari Iran menggunakan kapal laut melalui jalur perairan Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat.(Farisa, 2022) Kemudian pada tahun 2023, penyelundupan 309 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 309kg yang berasal dari sindikat narkoba internasional *golden crescent* yang meliputi Iran, Afganistan dan Pakistan terjadi di perairan selatan Jawa.(Humas BNN, 2023a) Pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba di Indonesia berjumlah sekitar 3,3 juta orang.(BNN, 2023) Dalam periode tersebut, narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat,(Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua Di Indonesia | Pusiknas Bareskrim Polri, n.d.) dan prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang.(Adri, 2023)

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis karena berada dekat dengan wilayah-wilayah yang dikenal sebagai pusat penanaman dan produksi opium. Dua wilayah utama yang terkenal dalam konteks ini adalah *Golden Triangle* dan *Golden Crescent*. *Golden Triangle* meliputi area perbatasan antara Thailand, Laos, dan Myanmar, yang sudah lama dikenal sebagai salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Di sisi lain, *Golden Crescent* mencakup wilayah Afghanistan, Iran, dan Pakistan, yang juga menjadi pusat utama produksi opium. Kedekatan geografis Indonesia dengan kedua wilayah ini menjadikannya rentan terhadap aliran perdagangan gelap narkoba, termasuk opium dan turunannya, yang dapat dengan mudah memasuki wilayah Indonesia. Hal ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya penanggulangan perdagangan gelap narkoba.(BNN Surakarta, 2021)

Melihat besarnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia dan jumlah narkoba yang diselundupkan dalam ketiga kasus besar dalam periode 2021 hingga 2023 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang sangat rawan akan penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba, dan tentu memerlukan penanganan yang lebih maksimal tidak hanya dari

aparatus dan pemerintah Indonesia saja, tetapi juga pihak internasional mengingat penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba tersebut melibatkan jaringan-jaringan atau sindikat perdagangan narkoba internasional. Perdagangan gelap narkoba telah menjadi kejahatan yang melampaui batas negara dan harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh karena bisa menjadi ancaman serius untuk suatu bangsa dan negara, bahkan dunia internasional. (BNN, 2022)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan bersifat analitis. Instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri (*human instrument*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang menyediakan informasi kepada peneliti melalui *literature review*. Analisa data dilakukan berdasarkan teknik analisa menurut Miles dan Huberman, yang menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Uji keabsahan data mencakup *credibility* (validitas internal), yang menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya berdasarkan data partisipan, *transferability* (validitas eksternal), yang mengevaluasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain, *dependability* (reliabilitas), yang memastikan konsistensi dan stabilitas data yang dikumpulkan, serta *confirmability* (obyektivitas), yang memastikan hasil penelitian bebas dari bias peneliti. (Sugiyono, 2013)

PEMBAHASAN

Menurut Clive Archer dalam bukunya "*International Organizations*", organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. (Archer, 2001)

UNODC Sebagai Instrumen

UNODC melaporkan peningkatan perhatian terhadap narkoba sintetis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dimana Indonesia menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkoba sintetis yang diproduksi di Asia Barat dan wilayah "Segitiga Emas" di Asia Tenggara. Narkoba sintetis ini tidak hanya didistribusikan untuk pasar lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai negara lain, seperti Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan. Sebagai jalur transit, Indonesia memainkan peran penting dalam alur distribusi narkoba dari produsen di Asia Barat dan Asia Tenggara ke pasar tujuan di negara-negara tersebut.(UN, 2021)

UNODC bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) dalam program seperti Global SMART (*Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends*) yang telah ada sejak tahun 2011. Selama periode 2021-2023, UNODC terus memperkuat Program Global SMART terutama berfokus khusus pada Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota termasuk Indonesia dalam menghasilkan, mengelola, menganalisis, dan melaporkan informasi tentang obat-obatan sintetis, serta menerapkan pengetahuan berbasis bukti ilmiah ini untuk merancang kebijakan dan program. Program ini menyediakan analisis tren dan data tentang narkoba sintetis yang penting untuk memahami pola distribusi dan konsumsi di Indonesia.(UNODC, n.d.-a)

Kemudian pada tahun 2022, UNODC memberikan dukungan untuk membentuk program pelatihan *Visit, Board, Search, and Seizure* (VBSS) bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA). Program ini diselenggarakan di sebuah pusat pelatihan yang berlokasi di kota pesisir Batam. Selama berlangsungnya pelatihan, lebih dari 100 petugas dari BAKAMLA telah mendapatkan peningkatan keterampilan yang signifikan. Pusat pelatihan ini menyediakan berbagai materi dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kunjungan, pemeriksaan, pencarian, dan penyitaan yang lebih efektif dan efisien. UNODC menyelenggarakan pelatihan bagi aparat penegak hukum Indonesia, yang mencakup teknik investigasi, penanganan barang bukti, dan strategi penegakan hukum terhadap perdagangan narkoba. Pelatihan ini bertujuan

untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba.(United Nations in Indonesia, n.d.)

UNODC juga menyediakan peralatan canggih seperti perangkat lunak untuk analisis data dan pemantauan komunikasi kriminal, yang digunakan dalam operasi penegakan hukum untuk memerangi perdagangan narkoba di Indonesia. UNODC dalam program VBSS tersebut juga memfasilitasi kendaraan bawah air yang dapat dioperasikan dari jarak jauh, yang akan membantu para peserta pelatihan di fasilitas Batam berlatih mencari narkoba yang disembunyikan di bawah lambung kapal. Program ini juga menyelenggarakan pelatihan khusus tentang pemeriksaan malam hari, deteksi bahan kimia, biologis, radioaktif, dan nuklir.(United Nations in Indonesia, n.d.)

UNODC telah menunjukkan perannya sebagai instrumen kebijakan sesuai dengan teori Clive Archer. UNODC berfungsi sebagai alat bagi Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dalam memerangi perdagangan gelap narkoba melalui dukungan teknis, pelatihan, penyediaan peralatan, dan teknologi mutakhir. Program-program yang dijalankan oleh UNODC memperlihatkan bagaimana organisasi internasional dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan global, seperti perdagangan narkoba.

UNODC Sebagai Arena

Teori Clive Archer mengenai peran organisasi internasional sebagai arena menekankan bahwa organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai tempat di mana negara-negara anggota dapat berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama. Dalam pandangannya, organisasi internasional menyediakan sebuah forum netral yang memungkinkan para anggota untuk memajukan pandangan dan kepentingan mereka.(Archer, 2001)

UNODC menyelenggarakan berbagai forum internasional dan regional yang melibatkan negara-negara anggota untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang strategi penanganan narkoba.

Selama periode 2021 hingga 2023, UNODC telah memberikan *consultative dialogue* kepada empat negara, termasuk Indonesia. Sebagai hasil dari *consultative dialogue* tersebut, UNODC yang melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) meluncurkan platform *Early Warning System* (EWS) yang dapat digunakan untuk mendeteksi *New Psychoactive Substances* (NPS). Platform ini bertujuan untuk mempercepat pertukaran informasi antara lembaga nasional, internasional, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba. (BNN, n.d.)

Kemudian dalam pertemuan antara Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose, dan Direktur Eksekutif UNOV-UNODC, Ghada Waly, pada tahun 2023, dibahas inisiatif strategis untuk memperkuat kerjasama dalam menangani masalah narkoba di kawasan. Pertemuan ini berfokus pada undangan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan High-Level Meeting on Drug Policy (HONLAP) yang diinisiasi oleh UNODC. (Humas BNN, 2023b)

Sebagai arena, UNODC memberikan platform bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain, berbagi informasi dan pengalaman, serta merumuskan kebijakan bersama dalam memerangi perdagangan gelap narkoba. Pertemuan ini juga membahas upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang menyeluruh dalam menangani permasalahan narkoba. Melalui peranannya sebagai arena, UNODC memfasilitasi diskusi dan pengembangan strategi regional yang lebih kohesif, menciptakan sinergi antar negara dalam penanganan perdagangan gelap narkoba. Partisipasi aktif Indonesia di forum ini tidak hanya meningkatkan profil negara dalam komunitas internasional tetapi juga memperkuat kapasitas nasional dalam menanggulangi masalah narkoba melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis bukti.

UNODC Sebagai Aktor Independen

Peran organisasi internasional sebagai aktor independen, menurut teori Clive Archer, menunjukkan kemampuan organisasi tersebut untuk bertindak otonom dan mempengaruhi hubungan internasional secara

mandiri, tanpa sepenuhnya tergantung pada negara-negara anggotanya. Organisasi internasional dapat bertindak sebagai aktor independen jika mereka memiliki struktur dan konstitusi yang memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan.(Archer, 2001)

Dalam konteks UNODC, peran ini mencakup inisiatif global dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba serta pengembangan kebijakan yang berdampak pada tingkat nasional. UNODC dapat memperkenalkan kebijakan baru, meluncurkan program independen, dan menghasilkan analisis mendalam yang mempengaruhi kebijakan di negara-negara anggota, termasuk Indonesia.

Setiap tahunnya, termasuk pada periode tahun 2021-2023, UNODC secara aktif menyusun laporan, riset, dan melakukan publikasi-publikasi mengenai situasi perdagangan gelap narkoba di Indonesia. Laporan seperti *World Drug Report*(UNODC, n.d.-b) memberikan gambaran mendalam tentang tren dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks perdagangan narkoba. Laporan ini memberikan analisis independen mengenai tren, tantangan dan kemajuan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk perdagangan gelap narkoba. Melalui laporan ini, UNODC menunjukkan kemampuannya untuk menyusun agenda yang mandiri dan memengaruhi diskursus global tentang narkoba.

Program-program UNODC di Indonesia mempengaruhi kebijakan nasional terkait perdagangan gelap narkoba. Indonesia telah mengimplementasikan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui proses ratifikasi konvensi tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 sebagai undang-undang pelaksana. Selain itu, negara ini juga telah menyusun undang-undang khusus mengenai narkotika, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.(Danial et al., 2022) Ini mencerminkan pengaruh UNODC sebagai aktor independen dalam sistem internasional.

UNODC menunjukkan kapasitas dan otonomi dalam melaksanakan program-programnya secara langsung, yang sejalan dengan pandangan Archer tentang organisasi internasional yang memiliki peran mandiri. UNODC menjalankan program untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia. Misalnya, pelatihan teknis yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk mengoperasikan perangkat identifikasi yang dapat membantu mengidentifikasi masuknya narkoba ke Indonesia. (Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, n.d.) Proyek seperti *Global Maritime Crime Programme* juga memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia, yang penting dalam mengatasi perdagangan gelap narkoba melalui jalur laut. (United Nations in Indonesia, n.d.)

Melalui program seperti *Southeast Asia Regional Programme*, UNODC bekerja dengan negara-negara tetangga Indonesia untuk mengatasi perdagangan narkoba secara regional, yang menunjukkan peran aktif dan otonomi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan lintas negara. (UNODC, 2022)

UNODC menunjukkan inisiatif mandiri dengan merancang dan melaksanakan berbagai program serta riset sesuai dengan agenda dan prioritas mereka sendiri. Melalui program-program tersebut, serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, UNODC memiliki dampak signifikan terhadap cara Indonesia menangani isu perdagangan narkoba. Pengaruh ini mencerminkan peran mereka sebagai aktor independen dalam konteks internasional.

KESIMPULAN

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaksanakan perannya sebagai organisasi internasional sesuai dengan teori menurut Clive Archer, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena atau fasilitator, dan sebagai aktor independen.

Sebagai instrumen, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memainkan peran penting dalam mendukung Indonesia menangani perdagangan gelap narkoba melalui berbagai program dan inisiatif. UNODC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dalam program-program seperti Global SMART dan Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS). Program-program ini memperkuat kapasitas penegak hukum Indonesia dengan menyediakan pelatihan, dukungan teknis, dan peralatan canggih.

Sebagai arena, UNODC juga melaksanakan koordinasi internasional, memfasilitasi kerjasama dan diskusi antar negara untuk menghadapi tantangan perdagangan narkoba, seperti *Consultative Dialogue*, *Early Warning System (EWS) Events*, *High-Level Meeting on Drug Policy* (HONLAP), dan berbagai forum juga koordinasi. Dalam peran ini, UNODC mengadakan berbagai forum dan pertemuan internasional yang memungkinkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk berbagi informasi dan strategi.

Sebagai aktor independen, UNODC mempengaruhi kebijakan nasional melalui laporan tahunan, riset, program-program, dan kegiatan-kegiatan yang didesain sesuai dengan agenda globalnya. UNODC membantu Indonesia merumuskan kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif dalam menangani masalah narkoba, menunjukkan kapasitasnya untuk bertindak mandiri dan mempengaruhi praktik dan kebijakan di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, UNODC berhasil menjalankan perannya sebagai instrumen kebijakan, arena koordinasi, dan aktor independen sesuai dengan teori Clive Archer, mendukung Indonesia dalam memerangi perdagangan gelap narkoba dengan lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Adri, A. (2023). *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika - Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>
- Archer, C. (2001). *International Organizations, Third edition*.

- BNN. (n.d.). *Platform Online Baru BNN: Deteksi Dini Narkoba Jenis Baru*. Retrieved July 26, 2024, from <https://bnn.go.id/platform-online-baru-bnn-deteksi-dini-narkoba-jenis-baru/>
- BNN. (2022). *Perdagangan Narkoba Merupakan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Strategi Indonesia dalam Mencegahnya*. <https://jatim.bnn.go.id/perdagangan-narkoba-merupakan-kejahatan-terorganisir-transnasional-strategi-indonesia/>
- BNN. (2023). *PRESS RELEASE CAPAIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2023 BNN KOTA YOGYAKARTA*. <https://yogyakartakota.bnn.go.id/press-release-capaian-kinerja-akhir-tahun-2023-bnn-kota-yogyakarta/>
- BNN Surakarta. (2021). *Kenapa Narkoba Bisa Sampai ke Indonesia*. <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/>
- Danial, Aulia, A., & Jumena, N. (2022). *Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*. 2(2), 2807–2863. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2>
- Farisa, F. C. (2022). *Termasuk 1 Ton Sabu di Pangandaran, Ini Deretan Penyelundupan Narkoba Terbesar yang Berhasil Digagalkan Halaman all - Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/19225431/termasuk-1-ton-sabu-di-pangandaran-ini-deretan-penyelundupan-narkoba?page=all>
- Humas BNN. (2023a). *Operasi PRG Gagalkan Penyelundupan 309 Kg Sabu Jaringan Golden Crescent*. <https://bnn.go.id/operasi-prg-gagalkan-penyelundupan-309-kg-sabu-jaringan/>
- Humas BNN. (2023b, March 14). *Kepala BNN RI Bertemu Executive Director UNOV - UNODC Bahas Upaya Penganggulangan Narkotika*. <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-bertemu-executive-director-unov/>
- Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia | Pusiknas Bareskrim Polri*. (n.d.). Retrieved June 11, 2024, from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia
- Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. (n.d.). Retrieved August 2, 2024, from <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-indonesia-dan-as-tegaskan-komitmen-bersama-penegakan-hukum-di-area-perbatasan.html>
- Penyelundupan 1,129 Ton Sabu Diungkap, Ini Beberapa Kasus Narkoba Terbesar di Indonesia : Okezone Nasional*. (2021). <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/14/337/2425036/penyelundupan-1-129-ton-sabu-diungkap-ini-beberapa-kasus-narkoba-terbesar-di-indonesia>

PKIP UNAIR. (2021). *Ketua MPR RI: Indonesia Darurat Narkoba - Universitas Airlangga Official Website*. <https://unair.ac.id/ketua-mpr-ri-indonesia-darurat-narkoba/>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

UN. (2021, June 22). *Perdagangan Metamfetamin Telah Meningkatkan di Asia Timur dan Tenggara, Meskipun Ada COVID-19 | Perserikatan Bangsa - Bangsa di Indonesia*. <https://indonesia.un.org/id/132545-perdagangan-metamfetamin-telah-meningkat-di-asia-timur-dan-tenggara-meskipun-ada-covid-19>

United Nations in Indonesia. (n.d.). *Indonesia Is Becoming a Center of Excellence in the Fight Against Maritime Crime | United Nations in Indonesia*. Retrieved July 22, 2024, from <https://indonesia.un.org/en/243355-indonesia-becoming-center-excellence-fight-against-maritime-crime>

UNODC. (n.d.-a). *Global SMART Programme*. Retrieved July 22, 2024, from <https://www.unodc.org/roseap/en/smart.html>

UNODC. (n.d.-b). *World Drug Report* . Retrieved July 31, 2024, from <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

UNODC. (2022). *Regional Programme for Southeast Asia and the Pacific*.